



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANA MARIA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 180551

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **675.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 660 m2/600 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/180 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **245.000.000**

1. MOTOR, HONDO CBR 150 CC SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 15 S M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. MOTOR, HONDA STYLO SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **32.850.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **15.356.604**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **968.206.604**

III. HUTANG **Rp.** **741.985.820**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **226.220.784**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.